

Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Energi dan Insentif Pajak dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumenep

Helliyati¹, Nabilatul Karimah², Nadelatus Sholehah³

^{1,2,3}*Universitas Annuqayah*

Hellysay86@gmail.com, nabilakarimah628@gmail.com, nadelatussholehab@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya, dan mengkaji kontribusi kedua kebijakan tersebut terhadap perekonomian lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi kepada informan dari unsur pemerintah daerah, masyarakat penerima subsidi, serta pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi subsidi energi secara nyata telah meringankan biaya utilitas rumah tangga dan menjaga daya beli, sementara insentif pajak membantu pelaku usaha kecil menekan biaya operasional. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh ketidakakuratan data penerima manfaat, tantangan geografis wilayah kepulauan, serta rendahnya literasi dan sosialisasi program. Di sisi lain, keberhasilan kebijakan didukung oleh komitmen pemerintah, regulasi yang jelas, tingginya kebutuhan masyarakat, dan sinergi antarpihak. Secara akumulatif, kebijakan fiskal ini memberikan kontribusi strategis melalui tiga indikator utama, yakni pengurangan beban ekonomi, peningkatan keberlangsungan usaha (UMKM), serta peningkatan daya beli yang menstimulasi perputaran ekonomi lokal. Implikasi temuan ini menekankan perlunya perbaikan tata kelola data terpadu, strategi distribusi kepulauan yang merata, serta penguatan edukasi publik guna mencapai tujuan kesejahteraan yang optimal.

Kata Kunci: *Subsidi Energi, Insentif Pajak, Kesejahteraan Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari-hari. Ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat (Aisah & Herdiansyah, 2020). Namun, peningkatan harga energi global, ketidakstabilan perekonomian, serta meningkatnya kebutuhan konsumsi energi masyarakat menyebabkan, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, menghadapi tekanan terhadap daya beli. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan subsidi energi sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi (Callysta Qabil et al., 2022).

Kebijakan subsidi energi merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi beban biaya masyarakat melalui pemberian bantuan terhadap komoditas energi tertentu, seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas. Kebijakan fiskal memiliki fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam

konteks ini, subsidi energi merupakan bentuk pelaksanaan fungsi distribusi dan stabilisasi pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan serta menjaga kestabilan ekonomi masyarakat (Huda et al., 2024).

Selain subsidi energi, pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal berupa insentif pajak untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan atau pengurangan kewajiban perpajakan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta membantu sektor-sektor tertentu agar tetap berkembang. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengatur aktivitas masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan (Aqmarina & Furqon, 2020).

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, perikanan, hingga usaha mikro dan masyarakat kecil (Chawa et al., 2020). Kondisi geografis kepulauan serta ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sektor ekonomi tradisional menyebabkan kebijakan subsidi energi dan insentif pajak memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan besarnya manfaat kebijakan fiskal tersebut, tetapi juga bagaimana implementasi kebijakan dilakukan di tingkat daerah. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan subsidi energi antara lain ketepatan sasaran penerima, distribusi bantuan, serta tingkat pemahaman terhadap kebijakan masyarakat yang diberikan. Sementara itu, dalam penerapan insentif pajak, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya informasi, rendahnya literasi perpajakan masyarakat, serta keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap program insentif yang tersedia (Riki Satia Muharam et al., 2025).

Keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Teori tersebut menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan subsidi energi dan insentif pajak menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan (Mandala et al., 2016).

Berbagai alternatif solusi dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal daerah, seperti memperbaiki sistem pendataan penerima subsidi, meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah, serta meningkatkan literasi pajak bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dalam penelitian ini solusi yang dipilih adalah melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pemahaman, serta persepsi masyarakat dan pihak terkait terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut (Huda et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Energi dan Insentif Pajak dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sumenep” menjadi penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak di Kabupaten Sumenep, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun

menghambat pelaksanaannya, serta kontribusi mengetahui kebijakan tersebut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi lapangan (field research) (Syahrizal & Jailani, 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Subjek penelitian telah ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini telah meliputi pemerintah daerah atau instansi terkait, masyarakat penerima subsidi energi, serta pelaku usaha atau wajib pajak yang memperoleh manfaat dari kebijakan insentif pajak.

Pengumpulan data telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Ardiansyah et al., 2023). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Observasi dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian.

Melalui metode tersebut, penelitian ini telah menghasilkan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Subsidi Energi, Insentif Pajak, dan Kesejahteraan Masyarakat

Subsidi energi merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan atau pengurangan biaya terhadap kebutuhan energi masyarakat agar harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan energi dasar seperti listrik dan bahan bakar (Muharam, Rusli, & Karlina, 2025).

Insentif pajak merupakan bentuk kebijakan pemerintah berupa pemberian kemudahan, pengurangan, pembebasan, atau fasilitas tertentu dalam bidang perpajakan kepada individu maupun pelaku usaha dengan tujuan mendorong aktivitas ekonomi. Melalui insentif pajak, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Sementara itu, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup. Kesejahteraan dapat dilihat melalui kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatnya daya beli, berkurangnya beban ekonomi, serta meningkatnya kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih layak (Wati et al., 2023).

Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan subsidi energi dan insentif pajak diimplementasikan serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

.Implementasi Kebijakan Subsidi Energi dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumenep

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat merasakan adanya perubahan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga setelah memperoleh subsidi energi, seperti subsidi listrik dan LPG. Bantuan tersebut memungkinkan masyarakat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan energi sehingga sebagian pendapatan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi energi memiliki fungsi sosial sebagai instrumen perlindungan masyarakat serta upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat (Riza Sofiana Dewi & Sova Sevilia, 2026).

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan subsidi energi di Kabupaten Sumenep masih menghadapi beberapa kendala. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat akibat sistem pendataan yang belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi belum tercatat sebagai penerima subsidi. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas distribusi dan pengawasan subsidi energi. Hambatan geografis tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi serta kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program (Setyawibawa, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan subsidi tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar tujuan dan mekanisme kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat, sementara sumber daya dan struktur birokrasi berperan dalam memastikan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Selain itu, ketepatan sasaran dalam pemberian subsidi menjadi faktor penting agar kebijakan mampu mencapai tujuan sosialnya. Kebijakan subsidi energi perlu dirancang dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas kebijakan karena manfaat ekonomi tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi tujuan utama program (Tri Rahayu, 2025).

Dengan demikian, implementasi kebijakan subsidi energi di Kabupaten Sumenep telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan beban ekonomi dan peningkatan akses terhadap kebutuhan energi dasar. Akan tetapi, diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, terutama dalam aspek pendataan penerima manfaat, pemerataan distribusi, serta penguatan pengawasan agar kebijakan subsidi energi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Insentif Pajak dalam Mendukung Kondisi Ekonomi Masyarakat

Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak melalui pengurangan atau fasilitas tertentu dalam pembayaran pajak. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara atau daerah, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Safrina & Soehartono, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi insentif pajak di Kabupaten Sumenep telah memberikan manfaat terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa adanya kemudahan dalam kewajiban pajak dapat membantu mengurangi tekanan biaya operasional usaha sehingga usaha dapat tetap berjalan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pemanfaatan insentif pajak belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai keberadaan program insentif pajak, prosedur pengajuan, serta persyaratan yang harus dipenuhi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak memerlukan dukungan berupa sosialisasi dan pelayanan publik yang lebih efektif. Menurut teori kebijakan fiskal, insentif pajak dapat memberikan dampak ekonomi apabila masyarakat memahami dan mampu mengakses fasilitas yang diberikan pemerintah (Pendit et al., 2021).

Oleh karena itu, peningkatan edukasi perpajakan dan penyederhanaan prosedur menjadi faktor penting agar manfaat insentif pajak dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Sumenep.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak di Kabupaten Sumenep.

Faktor pendukung tersebut meliputi:

1. Adanya komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi masyarakat.

Komitmen pemerintah menjadi salah satu faktor utama karena keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keseriusan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan (Ali et al., 2019).

2. Tersedianya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan.

Adanya regulasi yang jelas memberikan landasan hukum serta pedoman bagi pihak pelaksana agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Obot & Setyawan, 2017).

3. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan ekonomi.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan ekonomi juga menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan kebijakan, karena subsidi energi dan insentif pajak dianggap mampu membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat (Arfianto & Balahmar, 2014).

4. Adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Di samping itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran program, terutama dalam proses penyampaian informasi, pendataan penerima manfaat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan (Pridayani & Rivauzi, 2022). Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.

Selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak di Kabupaten Sumenep. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kebijakan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kebijakan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi serta kesalahan dalam memanfaatkan program yang tersedia (Fadila et al., n.d.). Oleh karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami agar masyarakat mengetahui prosedur dan manfaat dari kebijakan tersebut.

2. Data penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat.

Data penerima manfaat yang belum sepenuhnya akurat menjadi kendala dalam penyaluran bantuan karena dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran (Risal & Situmorang, 2024).

3. Kendala geografis wilayah kepulauan dalam proses distribusi

Faktor geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam proses distribusi dan pengawasan program agar dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

4. Kurangnya sosialisasi mengenai program insentif pajak.

Kurangnya sosialisasi mengenai program insentif pajak menyebabkan sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan maupun manfaat kebijakan tersebut (Lita Novia Yulianti, 2022).

Oleh karena itu, peningkatan koordinasi, pemutakhiran data, serta penguatan sosialisasi menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, serta partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga pada kemampuan dalam membangun koordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait. Dengan adanya komunikasi yang jelas, penyediaan sumber daya yang cukup, serta keterlibatan masyarakat, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Rani, 2024).

Kontribusi Kebijakan Subsidi Energi dan Insentif Pajak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan subsidi energi dan insentif pajak telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep. Subsidi energi memberikan dampak secara langsung dengan mengurangi biaya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan insentif pajak memberikan dampak melalui dukungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat (Khadijah, 2017).

Kontribusi kebijakan tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator:

1. Pengurangan Beban Ekonomi Masyarakat.

Kebijakan subsidi energi (seperti listrik, bahan bakar, atau gas) secara langsung menekan harga kebutuhan pokok dan biaya utilitas rumah tangga. Dengan

terpangkasnya alokasi dana untuk energi, keluarga dari berbagai lapisan terutama golongan rentan dan menengah ke bawah dapat mengalihkan sisa pendapatannya untuk sektor prioritas lain seperti pendidikan anak, layanan kesehatan, dan pemenuhan gizi keluarga (Muharam, Rusli, Karlina, et al., 2025).

2. Peningkatan Keberlangsungan Usaha

Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha (baik melalui keringanan pajak penghasilan, pembebasan pajak pertambahan nilai tertentu, maupun insentif sektoral) berfungsi sebagai bantalan finansial yang efektif. Kebijakan ini menurunkan biaya overhead operasional secara signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi. Akibatnya, pelaku usaha terutama UMKM dapat terhindar dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, menjaga likuiditas kas, serta terus melanjutkan roda produksi dan rantai pasok (Furqon, 2024).

3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

Daya beli merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi domestik. Ketika beban pengeluaran wajib (seperti energi dan transportasi) dapat diringankan melalui intervensi kebijakan, disposable income (pendapatan bebas) masyarakat secara otomatis meningkat. Peningkatan pendapatan bebas ini memicu naiknya permintaan terhadap berbagai produk barang dan jasa di pasar. Tingginya konsumsi rumah tangga ini pada gilirannya akan menstimulasi ekspansi bisnis dan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan (Halimah et al., 2024).

Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep kesejahteraan masyarakat yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi secara berkala, perbaikan sistem pendataan, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang tersedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan subsidi energi dan insentif pajak di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan subsidi energi secara nyata telah membantu meringankan biaya utilitas rumah tangga dan menjaga daya beli, sementara insentif pajak memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk menekan biaya operasional. Kendati demikian, efektivitas kedua kebijakan ini masih terkendala oleh masalah akurasi data penerima manfaat, tantangan geografis wilayah kepulauan, serta rendahnya literasi dan sosialisasi program di tengah masyarakat. Keberhasilan kebijakan tersebut didukung oleh komitmen pemerintah, landasan regulasi yang jelas, tingginya kebutuhan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah dan warga, meski faktor penghambat utama tetap mencakup ketidakakuratan data, hambatan distribusi logistik, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur yang berlaku. Secara akumulatif, kebijakan subsidi energi dan insentif pajak terbukti memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep melalui tiga indikator utama, yakni pengurangan beban ekonomi rumah tangga, peningkatan keberlangsungan dan

likuiditas usaha (khususnya UMKM), serta peningkatan daya beli yang menstimulasi perputaran ekonomi lokal.

Temuan penelitian ini membawa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis, di mana secara teoritis penelitian ini memperkuat konsep kebijakan fiskal bahwa instrumen distribusi dan stabilisasi melalui subsidi dan insentif berperan vital dalam menjaga kesejahteraan sekaligus menegaskan bahwa faktor implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan di tingkat daerah. Secara praktis dan kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan tata kelola birokrasi daerah, di mana pemerintah daerah dan instansi terkait harus lebih proaktif memperbaiki akurasi basis data terpadu penerima subsidi, merancang strategi distribusi khusus untuk menjangkau wilayah kepulauan secara merata, serta memperluas akses informasi dan edukasi perpajakan agar fasilitas insentif dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, I. U., & Herdiansyah, H. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi. *Share : Social Work Journal*, 9(2), 130. <https://doi.org/10.24198/Share.V9i2.21015>
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3). <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.23464>
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274. <https://doi.org/10.32332/Finansia.V3i2.2507>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jkmp (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/Jkmp.V2i1.408>
- Callysta Qabil, Christivany Purba, Maulidya Shamira Putri Prabowo, Nurul Ernawati, Rafina Wiyanti Hanafiah, Asianto Nugroho, & Sapto Hermawan. (2022). Sinergi Tarik Ulur Kenaikan Bbm, Kebijakan Stimulus Perpajakan Dan Dampak Ekonomi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 469–489. <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V5i3.55953>
- Chawa, A. F., Rozuli, A. I., & Nurdiani, R. (2020). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal Non-Perikanan Di Pulau Giligenting, Sumenep, Madura. 4(4).
- Fadila, R. A. N., Adisa, R. A., & Febiana, S. R. (N.D.). 8. Analisis Hambatan Implementasi Pajak Karbon: Perspektif Kebijakan Dan Regulasi Di Indonesia.
- Furqon, I. K. (2024). Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Umkm (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). 1(1).
- Halimah, U. N., Wullandari, M., Rivaldo, A. D., & Noviarita, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 1(4).

- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024a). *Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. 7.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 3(1), 24–36. <https://doi.org/10.31092/Jpkn.V3i1.1202>
- Khadijah, N. S. (2017). *Analisis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp) Melalui Insentif Fiskal Dalam Mendukung Ketahanan Energi Indonesia*. 3(2).
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/Manajemen.V2i1.127>
- Mandala, E., Setyadiharja, R., & Nurul Mulyani, J., Rio Refnaldi. (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) (Studi Kasus Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *Jip (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 247–264. <https://doi.org/10.24905/Jip.1.2.2016.247-264>
- Muharam, R. S., Rusli, B., & Karlina, N. (2025). *Gas Subsidi Untuk Siapa? Analisis Ekonomi Publik Atas Efisiensi Dan Pemerataan Subsidi Lpg 3 Kg Di Jawa Barat*.
- Obot, F., & Setyawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Pendit, I. P. W. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 418–423. <https://doi.org/10.22225/Jkh.2.2.3266.418-423>
- Pridayani, M., & Rivauzi, A. (2022). Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter Religius Terhadap Siswa. *An-Nuha*, 2(2), 329–341. <https://doi.org/10.24036/Annuha.V2i2.188>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 11(01).
- Rani, B. M. (2024). *Peran Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inovasi Teknologi: Perspektif Pelaku Industri Dan Pemerintah*. 4.
- Riki Satia Muharam, Budiman Rusli, Nina Karlina, & Candradewini, C. (2025). Implikasi Kebijakan Subsidi Lpg 3 Kg Terhadap Penerimaan Negara Dan Keuangan Daerah: Studi Kasus Jawa Barat. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 265–274. <https://doi.org/10.54259/Akua.V4i3.4534>
- Risal, M., & Situmorang, L. (2024). *Implementasi Program Kebijakan Pembagian Subsidi Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Untuk Warga Miskin Di Desa Sungai Manurung Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. 12.
- Riza Sofiana Dewi & Sova Sevilia. (2026). Analisis Kebijakan Subsidi Pemerintah Dalam Perspektif Mikro Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Eksya: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 3(2), 189–208. <https://doi.org/10.22373/Jurista.V9i1.252>
- Safrina, N., & Soehartono, A. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan. 4(1).
- Setyawibawa, R. A. (2026). *Tantangan Distribusi Dan Solusi Komunitas Dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia*. 6(10).

- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.49>
- Tri Rahayu, R. D. T. (2025). Politik Subsidi Dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Sistematis Atas Kebijakan Ekonomi Populis Di Negara Berkembang. *Ikraith-Ekonomika*, 8(3).
- Wati, R. R., Basuki, P., & Suriadi, I. (2023). Dampak Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/Oportunitas.V2i2.520>